

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN PASAMAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan teknis evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemda dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dan sebagai umpan balik untuk rekomendasi bagi daerah Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang diinginkan, perlu dimulai dengan suatu tahapan perencanaan program dan kebijakan yang baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman.

A. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun Sistimatika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Pasaman adalah :

- I. Pendahuluan
Bagian ini berisi tentang Dasar Hukum, gambaran umum organisasi visi dan misi, serta sistimatika penulisan LPPD.
- II. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016
Bagian ini menguraikan tentang Urusan, Program dan kegiatan, realisasi, proses perencanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan permasalahan solusi
- III. Tugas Pembantuan yang diterima
- IV. Tugas Umum Pemerintah
- V. Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

A. Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 Unit Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/1986 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman;
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, memperhatikan saran, pendapat dan masukan dari unsur terkait serta aspirasi masyarakat, dunia usaha atas dasar kesepakatan bersama maka dirumuskan Visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA USAHA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG TANGGUH MAJU DAN BERKEADILAN “.

Misi :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berkeadilan.
2. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan pelaku usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan pelaku usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan ukm
4. Meningkatkan kualitas layanan sektor industri, industri, perdagangan, koperasi dan UKM
5. Meningkatkan daya saing produk
6. Meningkatkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen

7. Meningkatkan pembinaan dan pengolahan pasar
8. Meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM

2. Gambaran Umum Organisasi;

- a. Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

No	NAMA	L/P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKA N	DIKLAT KEPEMIMPIN AN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A.	STRUKTURAL					
I.	SEKRETARIAT					
1.	ANWIR, S.Sos	L	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IV/C	S1 1994	1. Diklat PIM II
2	PILIHAN HASIBUAN	L	Sekretaris	Pembina Muda /IV/a	S1	ADUM
3.	EFA AMELIA,SH	P	Kasubag Umum	Penata Tk I/III/d	S1 Hukum	Diklat Pim IV
4.	JOHNIE ELVIS, SE	L	Bendahara	Penata Muda III/a	S1	
5.	MARJONI	L	Pengolah Kepegawaian	Penata Tk I/III/a	SLTA	
6.	FAUZUL USWANDI	L	Petugas K3	Pengatur Muda II/a	Paket C	
7.	JETRI	L	Pengaman Kantor	Juru I/c	Paket B	
8.	ISMET AFRIDAL	L	Petugas K3	Pengatur Tk I /a	Paket B	
9.	JASMINIARTI	P	Kasubag Keuangan	Penata T k I III/d	SMEA	
10	SIERA TANIA,A.Md	P	Verifikator Keuangan	Pengatur Tk I II/d	Akademi Akutansi	
11	ELVA RNIZA	P	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Penata Tk I III/d	SMEA	1. Diklat PIM IV
12	DENI ASTUTI	P	Fungsional Umum	Penata Muda III/a	S.1 Teknik Industri	
II.	BIDANG INDUSTRI					
13	YUNIRMAN,S,ST	L	Kabid Perindustrian	Penata Tk I III/d	D4	1. Diklat PIM IV
14	ARIE PURNAMA DINATA		Kasi Bimbingan Pengawasan Usaha	Penata Muda Tk I III/b	S1.	
15	RONALD ANWAR, ST	P	Kasi Bimbingan dan Pengawasan Usaha	Penata Muda Tk I III/b	S1.	
16	IRWAN RUDI,ST	L	Kasi Pengembangan Aplikasi Teknologi Tepat Guna	Penata III/c	S1 Teknik Industri	1. Diklat PIM IV
17	IBRAHIM, SE	L	Penyuluh Industri	Penata Muda III/a	S.1 Ekonomi 2015	
18	RIKA ZULHIDAYATI	P	Pengadministrasian	Pengatur Muda II/a	SMU	
19	YASNIL,SE	L	Penyuluh Koperasi	Penata Muda III/a	S.1 Ekonomi Pembangunan	
20	ADMIALDI,SH	L	Fungsional Umum	Pembina Muda /IV/a	S1.	

21	MIRIS,Sag.MH	L	Fungsional Umum	Pembina Muda Tk I /IV/b	S.2	
II.	BIDANG PERDAGANGAN					
22	RINI APRIANTI,SS	L	Kabid. Perdagangan	Penata Muda TkI K III/b	S1	1.Diklat PIM IV
23	BERMAN,SH	L	Kasi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Penata Tk I/ III/d	S1 Hukum	SEPADA
24.	ZAIRIL,SE	L	Kasi Pengembangan usaha pasar dan sarana perdagangan	Penata Tk I III/d	S1. Ekonomi	1. Diklat PIM IV
25	DEDI CANDRA,SE	L	Fungsional umum	Penata /III/c	S1 Ekonomi	
26	YUFRIZAL	L	Kasi Bimbingan Usaha pendaftaran dan informasi perusahaan	Penata Tk IIII/d	SMA	
27	RINA ROSALIA,ST,M.Pd	P	Penguji Mutu Barang	Penata Muda Tk I III/b	S2	
28	RONALD ANWAR,ST	L	Penyuluh	Penata Muda Tk I III/b	S1 Teknik Industri	
29	MALFIANTONI, SH	L	Pengadministrasian Umum	Penata Tk I III/a	S.1 Hukum	
30	ETMAL HALIADI	L	Pengadministrasian	Pengatur Muda II/a	SMU	
31	BITNER ARITONANG, SH	L	Fungsional Umum	Penata Muda IV/a	S1 Hukum	1.Diklat PIM IV
IV.	BIDANG KOPERASI DAN UKM					
32	Nazir Namri,SE	L	Kabid.Koperasi	Pembina Muda Tk I /IV/b	S1	Pim 3
33	RAHIMAL,SH	L	Fungsional Umum	Pembina Muda /IV/a	S1 Hukum	
33	ARIZAL,SH	L	Kasi Pembinaa Kelembagaan Koperasi	Penta T k I /III/d	S1 Hukum	
34.	IDRUS PAYAN,SH	L	Kasi Pembinaan Usaha Koperasi	Penata T k I/III/d	S1 Hukum	1. Diklat Pim IV
35.	FELLI YONDRA	L	Pengumpul dan Pengolah Data	Pengatur Tk I II/b	SMK	
36.	SRI HARYANTI	P	Kasi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	Penata Tk I III/d	SMEA	
37	DARMADI	L	Staf	Penata Muda /III/a	S.1Hukum	
38	ARLISKO HENDRI	L	Staf	Penata Tk I III/ b		
V	UPT PASAR					
39	ANASRIL	L	Kasub Tata Usaha UPT Pasar	Penata Muda Tk I/III/b	SLTA	
40	RAMADAN AHMAD	L	Kasub Tata Usaha UPT Pasar lelang komoditi	Penata Muda Tk IIII/b	SLTA	
41	WILERNI,SH	P	Kasubag TU UPT Pasar	Penata/III/c		
42	DARUSMAN, SH	L	Petugas Kercis Pasar	Penata Muda /III/a	S.1 Hukum	
43	ELFIAN	L	Petugas Kercis Pasar	Pengatur Muda Tk 1/II/b	SMA	
44	RAINER	L	Caraka	Pengatur Muda II/a	Paket C	
45	EDWAR,B.Sc	L		Penata Tk I III/d	S1.AAI	

46	JUNAWAN	L	Pengadministrasian Umum	Pengatur Muda Tk I /II/b	SLTA	
47	MULYADI,SE	L	FungsionalUmum	Pengatur Tk I III/a	S.1 Ekonomi	
48	NOFRINALDI,SH		Kepala UPT Pasar Komoditi	Pengatur Tk I III/a	S.1	

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi (menjelaskan SOP SKPD beserta jumlahnya)

Urusan Koperasi dan UKM Jumlah SOP 82 Buah

Bagian Umum jumlah 24

1. Tentang menghimpun peraturan perundang-undangan
2. Tentang Pembuatan data nominatif pegawai
3. Tentang pembiitan daftar urutan kepangkatan pegawai
4. Tentang pengendalian surat masuk
5. Tentang Pengendalian surat keluar
6. Tentang Pencatatan ADM Perjalanan Umum
7. Tentang pembuatan buku inventaris
8. Tentang Pembuatan kartu inventaris
9. Tentang pembuatan kartu pemeliharaan
10. Tentang pembuatan usulan penghapusan barang tidak efektif
11. Tentang penyusunan daftar kebutuhan alat perlengkapan kantor
12. Tentang penyusunan daftar rencana pengadaan perlengkapan kantor
13. Tentang pengaturan daftar petugas kebersihan kantor dan perkarangan kantor
14. Tentang persiapan jadwal pemakaian aula
15. Tentang penyusunan draft rancangan perda
16. Tentang penyiapan file pegawai dinas
17. Tentang penyiapan daftar usulan mutasi dan promosi pegawai
18. Tentang penyiapan usulan kenaikan pangkat pegawai
19. Tentang penyipian daftar pindah pegawai
20. Tentang penyiapan daftar pesiun pegawai
21. Tentang pebyiapan surat teguran
22. Tentang penyiapan rekap absensi
23. Tentang penyiapan laporan kepegawaian
24. Tentang pelaksanaan tugas atasan

Bagian Keuangan 14

1. Tentang menghimpun peraturan perundang-undangan
2. Tentang pembuatan draf surat keputusan bupati pasaman
3. Menginventarisasi DPA
4. Tentang pembentukan pengelola keuangan
5. Tentang pembentukan bendaharawan gaji
6. Tentang penyipian program dan kegiatan
7. Tentang menyiapkan surat pengajuan dana
8. Tentang pembuatan RKA
9. Tentang pembuatan ABT
10. Tentang pembuatan laporan keuangan
11. Tentang pembuatan sistim pengelolaan keuangan akuntabel
12. Tentang laporan pertanggungjawaban keuangan
13. Tentang laporan evaluasi pengelolaan keuangan
14. Tentang pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Evlap 16

1. Tentang menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
2. Tentang Menyusun laporan fisik keuangan
3. Tentang menyusun rencana kerja
4. Tentang pembuatan laporan
5. Tentang Menyusun rencana kegiatan
6. Tentang menghimpun data kinerja dinas
7. Tentang pembuatan data evaluasi kinerja
8. Tentang menyusun rencana kinerja tahunan
9. Tentang menyiapkan bahan stnadar kopotensi
10. Tentang penyusunan lakip
11. Tentang penyusunan LKPJ
12. Tentang Penyusunan LPPD
13. Tentang penyusunan kelender evaluasi dan pelaporan
14. Tentang pembuatan laporan pencapaian kinerja SKPD
15. Tentang pengumpulan data dan informasi
16. Tentang pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Koperasi dan UKM jumlah SOP 8 buah

1. Menghimpun peraturan peundang-undangan UKM
2. Meninventarisasi data UKM
3. Penyiapan bahan penuntun program UKM
4. Penyiapan panduan sumber dana
5. Penyiapan sumber daya manusia
6. Penyiapan evaluasi dan pelaporan
7. Penyipaan fasilitasi bahan dan data UKM
8. Pelaksanaan pendataan UKM

Bidang Koperasi kelambagaaan 10

1. Menghimpun tentang peraturan perundang-undangan kelembagaan koperasi
2. Mengidentifikasi data kelembagaan
3. rencana kerja pembinaan kelembagaan koperasi
4. Penyiapan bahan dan aturan tenng perkoperasian
5. Menyiapan bahan tentang pengesahan
6. Menyiapan persyaratan untuk pengesahan dan pendirian koperasi
7. Menyipkan persyaratan untuk perubahan anggaran dasar koperasi
8. Menyiapkan bahan-bahan untuk pembubaran koperasi
9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
10. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan

Bidang Koperasi seksi usaha koperasi 10

1. Menghimpun tentang peraturan perundang-undangan tentang usaha koperasi
2. Mengidentifikasi data usaha koperasi
3. rencana kerja pembinaan usaha koperasi
4. Penyiapan bahan usaha simpan pinjam
5. pendataan koperasi simpan pinjam
6. Menyiapkan bahan data-data koperasi
7. Menyiapkan bahan perlengkapn pengembangan koperasi
8. Menyipkan bimbingan tentang usaha koperasi
9. Menyiapkan undang dan peraturan tentang usaha koperasi
10. Monitoring dan evaluasi

Urusan Industri Jumlah SOP adalah 24 buah

Bagian Industri 11

1. Menghimpun undang-undang
2. Olah data /informasi TTG
3. Rancangan program/kegiatan
4. Mengadakan penelitian TTG
5. Memanfaatkan hasil penelitian TTG
6. Fasilitasi kemitraan UKM
7. Sosialisasi hasil penelitian TTG
8. Fasilitasi kerjasama industri dan sektor lainnya
9. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri dengan dinas terkait
10. Evaluasi dan pelaporan Kegiatan
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang

Bagian Industri

1. Menyiapkan bahan petunjuk teknis
2. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan
3. Menginventarisasi pengolahan data bidang sarana dan pengembangan usaha
4. Menyusun program kerja bidang sarana dan pengembangan usaha
5. Penyiapan bahan penyusunan tata ruang kawasan industri
6. Menghimpun data TDI dan IUI
7. Penerbitan berita acara pemeriksaan penerbitan IUI
8. Menghimpun data kawasan industri
9. Penyipian bahan-nahan promosi
10. Penyiapan bahan dan data pemberian fasilitas usaha
11. Penyiapan data fasilitasi permodalan bagi IKM
12. Pelaporan Kegiatan
13. Penyelesaian tugas dari atasan

Urusan Perdagangan 41

Perdagangan 21

1. Menghimpun perundang-undangan
2. Mencatat dan pengolahan data
3. Penyiapan bahan petunjuk pemecahan ,masalah
4. Penyiapan bahan penyusunan program
5. Penyiapan bahan penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan monitoring
6. Evaluasi kegiatan
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring produksi dalam negeri

8. Menyiapkan bahan pembinaan perlindungan konsumen
9. Penyipian bahan sosialisasi
10. Inventarisasi dan Publikasi
11. Menghimpun data pelayanan
12. Pendataan dan pengembangan kelembagaan konsumen
13. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
14. Menyiapan bahan pengawasan barang beredar dan jasa
15. Melakukan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum
16. Melakukan sosialisasi pengawasan
17. Melakukukan pembinaan dan pemberdayaan petugas barang beredar
18. Menyelenggarakan pelaporan dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa indonesia
19. Mengolah data sistim informasi perdagangan
20. Koordiansi denga aparat penegak hukum
21. Evaluasi kegiatan pada tasan

Urusan Perdagangan 20

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
2. Menginventarisasi dan mengolah data
3. Menyiapkan berumusan penyusunan program
4. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha perdagangan
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring produksi dalam negeri
6. Menyiapkan bahan pembinaan perlindungan konsumen
7. Penyipian bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
8. Menyiapkan bahan dan data koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang import
9. Menyiapkan bahan pengujian inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji
10. Menghimpun data pelayanan
11. Pendataan dan pengembangan kelembagaan konsumen
12. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
13. Menyiapan bahan pengawasan barang beredar dan jasa
14. Melakukan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum
15. Melakukan sosialisasi pengawasan
16. Melakukukan pembinaan dan pemberdayaan petugas barang beredar
17. Menyelenggarakan pelaporan dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa indonesia
18. Mengolah data sistim informasi perdagangan
19. Koordiansi denga aparat penegak hukum
20. Evaluasi kegiatan pada tasan

Urusan Pekerjaan Umum 13

1. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dibidang pengembangan usaha pasar dan sarana perdagangan
 2. Menginventarisasi dan mengolah informasi
 3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program
 4. Menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan pembinaan an pengawasan monitong evaluasi kegiatan perdagangan
 5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dan pemberian Izin
 6. Pengolahan bahan dan pembinaan komoditas
 7. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 9. Pelaksanaan pameran dan promosi
 10. Pelaksanaan bazar
 11. Fasilitas rehabilitasi pembangunan pasar daerah dan pasar nagari
 12. Pembinaan terhadap UPT Pasar
 13. Penyajian bahan pelaksanaan pasar
- c. Standar Pelayanan Minimal (bagi SKPD yang telah memiliki SPM). Tidak ada
- d. Peraturan yang mendasari pelaksanaan tupoksi dan program kegiatan organisasi (Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri,Peraturan Daerah).
- Peraturan yang mendasari Tupoksi, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 3. Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pengadaan Barang dalam Pengawasan
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang KUKM
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Kecamatan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman.

e. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Restra, Renja, RKA dan DPA SKPD.

RENJA	RKA	DPA
1.Program Pelayanan Adminstrasi Perkatoran	1.Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1. Kegiatan Administrasi perkantoran	1. Kegiatan Administrasi perkantoran	1. Kegiatan Administrasi perkantoran
2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi	3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi	3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi
II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	1.Pengadaan Peralatan dan Mesin
III.Program Peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan disiplin aparatur	III.Program Peningkatan disiplin aparatur
1.Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.	1.Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.	1.Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.
IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Kegiatan Penyusunan laporan SKPD	1.Kegiatan Penyusunan laporan SKPD	1.Kegiatan Penyusunan laporan SKPD
V.Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	V.Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	V.Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1. Pelaksanaan DAK Pasar Bidang Perdagangan	1.Pelaksanaan DAK Pasar Bidang Perdagangan	1.Pelaksanaan DAK Pasar Bidang Perdagangan

VI.Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	VI.Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	VI.Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
1.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM	1.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM	1.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM
V.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	V.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	V.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	1.Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	1.Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
2.Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan	2.Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan	2.Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan
VII.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	VII.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	VII.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.Pelaksanaan bazar daerah	1.Pelaksanaan bazar daerah	1.Pelaksanaan bazar daerah
VIII.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	VIII.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	VIII.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Kegiatan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	2. Kegiatan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	3. Kegiatan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
2.Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	2.Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	2.Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
3.Monitoring,evaluasi dan pelaporan	3.Monitoring,evaluasi dan pelaporan	3.Monitoring,evaluasi dan pelaporan
4.Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	4.Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	4.Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
5.Revitalisasi Koperasi	5.Revitalisasi Koperasi	5.Revitalisasi Koperasi
IX.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	IX.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	IX.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1.Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1.Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian daerah	2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian daerah	2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian daerah
X.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	X.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	X.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
1.Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa	1.Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa	1.Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
XI.Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	XI.Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	XI.Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah	1.Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah	1.Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah
2.Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah	2.Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah	2.Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah
XII. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	XII. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	XII. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1.Kegiatan Operasional UPT Pasar	1.Kegiatan Operasional UPT Pasar	1.Kegiatan Operasional UPT Pasar
XIII.Program Pengembangan industri kecil menengah	XIII.Program Pengembangan industri kecil menengah	XIII.Program Pengembangan industri kecil menengah
1. 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1. 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1. 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
3. Penyusunan kebijakan industri terekait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	3. Penyusunan kebijakan industri terekait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	3. Penyusunan kebijakan industri terekait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

4. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah	4. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah	4. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah
5. 5. Pendataan UKM Kab. Pasaman	5. 5. Pendataan UKM Kab. Pasaman	5. 5. Pendataan UKM Kab. Pasaman
6. Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)	6. Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)	6. Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)
7. 7Peningkatan motivasi bisnis pelaku usaha	7. Peningkatan motivasi bisnis pelaku usaha	7. Peningkatan motivasi bisnis pelaku usaha
XIV.Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan	XIV.Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan	XIV.Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan
1.Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	1.Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	1.Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan
XV.Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	XV.Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	XV.Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	1.Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	1.Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

BAB II
PROGRAM URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

2.2.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Program dan Kegiatan

No	Urusan/Program	Kegiatan/Bidang Pelaksana
(1)	(2)	(3)
A.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	
1	Program pembangunan infrastruktur Perdesaan	1) Pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan (Bidang Perdagangan)
B.	URUSAN KOPERASI DAN UKM	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2) Kegiatan Administrasi perkantoran (Sekretariat)
		3) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat)
		4) .Kegiatan Rapat dan Koordinasi Sekretariat)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	5) Pengadaan Peralatan dan Mesin (Sekretariat)
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	6) Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur. (Sekretariat)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7) .Kegiatan Penyusunan laporan SKPD (Sekretariat)
5.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	8) Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah (Sekretariat)
		9) Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan (Sekretariat)
6.	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	10) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM (Bidang Koperasi dan UKM)
7.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	11) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian (Bidang Koperasi dan UKM)
		12) Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (Bidang Koperasi dan UKM)
		13) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bidang Koperasi dan

No	Urusan/Program	Kegiatan/Bidang Pelaksana
(1)	(2)	(3)
		UKM)
		14) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi Bidang Koperasi dan UKM)
		15) Kegiatan Revitalisasi Koperasi Koperasi Bidang Koperasi dan UKM)
C.	URUSAN PERDAGANGAN	
	1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	16) Pelaksanaan Bazar Daerah (Bidang Perdagangan)
	2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	17) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (Bidang Perdagangan)
		18) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian daerah (Bidang Perdagangan)
	3. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	19) Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa (Bidang Perdagangan)
	4 Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	20) Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah (UPT Pasar)
		21) Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah (Bidang Perdagangan)
	5 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	22) Kegiatan Operasional UPT Pasar (UPT Pasar)
D	URUSAN INDUSTRI	
	1 Program Pengembangan industri kecil dan menengah	21) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (Bidang Industri)
		22) Pembinaan industry kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klasterindustri (Bidang Industri)
		23) Penyusunan kebijakan industri terekait dan industri penunjang industri kecil dan menengah (Bidang Industri)
		24) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah (Bidang Industri)

No	Urusan/Program	Kegiatan/Bidang Pelaksana
(1)	(2)	(3)
		25) Pendataan UKM Kab. Pasaman (Dekranasda) (Bidang Industri)
		26) Fasilitasi kiemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda) (Bidang Industri)
		27) Peningkatan motivasi bisnis pelaku usaha (Bidang Industri)
	2 Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan	28) Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan (Bidang Industri)
	3 Program peningkatan kapasitas iptek sisitem produksi	29) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2.2.2 .Ringkasan Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2016 berdasarkan DPA SKPD (format tabel II.3 terlampir).

2.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.3.1
Realisasi Program dan Kegiatan**

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
A.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	
1.	Program pembangunan nfrastruktur Perdesaan	
	1) Pelaksanaan DAK Bidang (Bidang Perdagangan Perdagangan)	<p>Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman dengan melakukan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pasar Panti dengan pembangunan 2unit lapak 2. Rehab Kantor Pasartapus dan pembangunan 2 unit lapak dan 9 unit los ganti atap, pembuatan WC Umum dan 4 unit kios ganti atap 3. Pasar Benteng 7 Unit Los ganti atap dan pemasangan konovi padatempat jualan

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
B.	URUSAN KOPERASI DAN UKM	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	2) Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran selama 12 bulan di Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman
	3) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman
	4) Rapat dan Koordinasi	Terlaksananya fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman selama 12 bulan
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
	5) Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin di Dinas Perindagkop dan UKM Selama 12 bulan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur
3.	Program Peningkatan disiplin aparatur	
	6) Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.	Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur di Dinas Perindagkop dan UKM sebanyak 48 orang untuk mengoptimalkan kinerja aparatur
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	7) Kegiatan Penyusunan laporan SKPD	Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan dengan melakukan penyusunan Laporan SKPD <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Fisik Keuangan ▪ LAKIP ▪ LKPJ ▪ LPPD ▪ RKT ▪ Penetapan Kinerja ▪ Laporan Keuangan SKPD
5	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	
	8) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM	- Terselenggaranya pendataan UKM Per Nagari Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman 4.778 unit UKM se Kabupaten Pasaman

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		- Terlaksananya sosialisasi UKM pendaftaran merk peserta 20 UKM Se Kabupaten Pasaman
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
	9) Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya perencanaan dan koordinasi pengembangan perdagangan industri koperasi dan UKM di Kabupaten Pasaman
	10) Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 4 urusan di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	11) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya : - pelatihan pembukuan perkoperasian untuk 2 koperasi dengan peserta 60 orang yaitu : 1.Koperasi Agro Bina Kec. Rao Utara 2. Koppas Mandiri kumpulan Kec.Bonjol - Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian untuk 4 koperasi dengan dengan jumlah peseta 30 orang perkoperasi yaitu : 1.Koperasi sejahteramandiri Kec.Rao 2.Koperasi Suka Maju Mandiri Kec. Tigo Nagari 3. Koperasi Bina Usaha kec. Rao Selatan 4.Koperasi Jaya bersama mandiri Kec.MapatTunggul Selatan
	12) Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya penilaian terhadap - Pelaksanaan Hari Koperasi - Penilaian kesehatan koperasi sebanyak 42 Koperasi - Koperasi berprestasi sebanyak koperasi 15 unit - Terlaksananya temu ramah perkoperasian padahari koperasi
	13) Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Termonitoringnya Bantuan sarana dan prasarana berupa dana bergulirdan Bansos
	14) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Pembinaan Kelembagaan Koperasi a. Terlaksananya RAT bagi koperasi di Kabupaten Pasaman sebanyak 42 unit Koperasi dari 109 buah kop.yang aktif dengan total koperasi 231 Koperasi yang tidak aktif 122 koperasi b. terbinaanya Koperasi dari 109 buah koperasi yang aktif

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
	15) Kegiatan Revitalisasi Koperasi	Teridentifikasinya koperasi yang tidak aktif untuk dapat dibubarkan
C. URUSAN PERDAGANGAN		
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
	1) Pelaksanaan Bazar Daerah	Peningkatan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman dengan Pelaksanaan Bazar Daerah diadakan di 12 Lokasi, Yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Simpang Kec. Simpati 2. Ganggo Hilir Kec. Bonjol 3. Ladang Panjang Kec, Tigo Nagari 4. Silayang Kec. Mapat Tunggul Selatan 5. Tapus Kec. Padang Gelugur 6. Rao Kec. Rao 7. Koto Nopan Kec. Rao Utara 8. Simpang Tonang kec. Duo Koto 9. Cubadak Kec. Duo Koto 10. Pasar Ampang Gadang Kec. Panti 11. Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping 12. Pasar Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
	2) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Barang beredar di Setaip pasar dalam Kabupaten Pasaman, seperti air minum kemasan (AMDK), makanan Ringan/Snack, elektronika, juga masa berlaku (kadarluasa) barang tersebut, - Pengujian labor terhadap makanan dan minuman yang mengandung borak dan zat pewarna terdapat 2 maknan yang mengandung borak seperti kerupuk nasi dan kripik jagung
	3) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Telrlaksananya sidang tera di 10 kecamatan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Kumpulan Kecamatan Bonjol 2. Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari 3. Pasar Lansek Kodok Kecamatan Rao Selatan 4. Pasar Tapus Kecamatan Padang Gelugur 5. Pasar Rao Kecamatan Rao 6. Pasar Cubadak Kecamatan Duo Koto 7. Pasar Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping 8. Pasar Panti Kecamatan Panti 9. Pasar Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul 10. Pasar Simpang Kecamatan Simpati

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
3.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	
	4) Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa dan Biaya Operasional KADIN	Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang strategis di 4 pasar (benteng, panti, tapus dan kumpulan) setiap minggunya dan informasi harga pasar kepada masyarakat Kab. Pasaman melalui media elektronik (Reza Radio) Kadin menghadiri pameran
2.	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	5) Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Terlaksananya fasilitasi lelang komoditi unggulan Kabupaten Pasaman pada Lelang Propinsi Sumatera Barat Terciptanya harga yang kondusif ditingkat pedagang pengumpul komoditi.
	6) Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah	Peningkatan volume produk dan wilayah pasar usaha mikro kecil menengah 1. Pameran Inacrafedi Jakarta 2. Pameran Sumbar expo diBandung 3. Pameran Padang Fair di Padang 4. Pameran Padang Publik service di Padang 5. Pameran ulang tahun Pasaman 6. Pameran Jambore PKK di Sawahlunto 7. Pameran songket disawahlunto
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	
	7) Kegiatan Operasional UPT Pasar	Terciptanya pasar yang kondusif dan meningkatnya PAD untuk 4 Pasar yaitu; Pasar Benteng, Pasar Tapus, Pasar Kumpulan dan Panti
D.	URUSAN INDUSTRI	
1	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	
	1) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya Kemampuan berwirausaha melalui - Pelatihan CEFE/Kewirausahaan untuk 20 IKM se Kabupaten Pasaman - Pelatihan Motifasi Bisnis/AMT UNTUK 20 IKM se Kab. Pasaman - Pelatihan untuk pengelolaan tempat kerja untuk 20 IKM se Kab. Pasaman

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
	2) Pembinaan industry kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya Pengembangan usaha UKM melalui pelatihan 20 IKM
	3) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Terciptanya bangunan sentra industri rotan kayu bambu di Kecamatan Duo Koto
	4) Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil menengah	Pemberian bantuan sertifikat halal untuk 9 IKM Makanan se Kabupaten Pasaman yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Har Pareso 2. Kacang Telor 3. Roti Ikako 4. Pisang salai alvina 5. Randang Paku karya mandiri 6. Firman Roti 7. Kripik Pisang pesona razaki 8. Rem Piyek Putri Kembar 9. Pisang selai manis
	5) Pendataan IKM Kab. Pasaman	Terdatanya IKM Sebanyak 914 Unit IKM di Kabupaten Pasaman dari total 1.315 Unit
	6) Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)	Meningkatnya Pendapatan pelaku IKM Kabupaten Pasaman melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pasaman, dan Dekranasda melakukan Antara Laian : <ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri Pameran inacrafe di Jakarta - Mengikuti study kompotitif di Cirebon - Mengikuti Pameran Sumbar expo di Bandung - Mengikuti pameran produk unggulan daerah
	7) Peningkatan motivasi bisnis pelaku usaha	Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis bagi 20 IKM pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman melalui pelatihan Kemasan 20 IKM makanan Se Kabupaten Pasaman
2	Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan	
	8) Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	Terdampinginya dan terbinanya IKM Kab. Pasaman oleh Bidang Industri dan sebnyak 40 sentra dan Tumbuh dan berkembangnya IKM Kabupaten Pasaman dengan pola manajemen sehat dan maju melalui dampingan langsung oleh bidang industri dan TPL serta meningkatnya kapasitas produksi

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
3	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	
	9) Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi	Terciptanya produk berbasis kakao

2.3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 (Berdasarkan DPA SKPD Tahun 2016)

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2016 untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah sebesar Rp. 1,786,770,400.00 ,- realisasi sebesar Rp.,- atau % untuk urusan Koperasi dan UKM anggaran adalah sebesar Rp. 1,204,082,900.00 ,-realisasi sebesar Rp.,- atau % Untuk urusan industri anggaran sebesar Rp. 2,037,953,200.00 ,- dengan realisasi sebesar Rp. % dan untuk urusan perdagangan dengan anggaran Rp. 1,317,076,250.00 ,- dan realisasi sebesar Rp% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.4.1
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
1	Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
	1) Pelaksanaan DAK Pasar Bidang Perdagangan	1.786.770.400, -	,-	
B.	URUSAN KOPERASI DAN UKM			
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkatoran			
	1) Kegiatan Administrasi perkantoran	151.570.000,-	,-	
	2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	102.142.150,-	,-	
	3) Kegiatan Rapat dan Koordinasi	107.330.000,-	,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur			
	4) Pengadaan Peralatan dan Mesin	298.000.000,-,-	,-	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur			
	5) Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.	24.000.000,-	,-	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	6) Kegiatan Penyusunan laporan SKPD	10.000.000,-	,-	
5	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif			
	7) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM	54.994.950,-	,-	
6	Program perencanaan Pembangunan Ekonomi			
	8) Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	40.000.000,-	,-	
	9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	39.914.000,-	,-	
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	10) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	89.994.600,-	,-	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	11) Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	76.501.400,-	,-	
	12) Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	49.994.950,-	,-	
	13) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	78.644.400,-	,-	
	14) Kegiatan Revitalisasi Koperasi	80.996.450,-	-	
C.	URUSAN PERDAGANGAN			
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
	1) Pelaksanaan bazar daerah	126.219.550,-	,-	
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
	2) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	41.414.250-	,-	
	3) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	102.544.350,-	,-	
3	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional			
	4). Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa dan Biaya Operasional KADIN	65.022.250,-	,-	
4	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
	5) Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah	41.998.700-	,-	
	6) Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah	304.601.050,-	-	
5	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
	7) Kegiatan Operasional UPT Pasar	357.968.050,-,-	,-	
D.	URUSAN INDUSTRI			
1	Program pengembangan industri kecil menengah			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	151.247.450,-	,-	
	10) Pembinaan industry kecil menengah dalam memperkuat jaringan klasterindustri	63.618.850,-		
	11) Penyusunan kebijakan industry terkaitdan industry penunjang industry kecil dan menengah	1.073.275.800,-		
	12) Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil menengah	81.750.250,-		
	13) Pendataan IKM Kab. Pasaman	66.147.900,-	,-	
	14) Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)	394.149.100,-	,-	
	15) Peningkatan Motivasi Bisnis Pelaku Usaha	78.547.350	,-	
2	Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan			
	6) Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	48.740.950-	,-	
	Total	6.068.574.700,-		

2.2.5. Proses Perencanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Proses perencanaan atas program kegiatan sudah termuat dalam RPJMD, RKPD Renja SKPD dan RKA Thaun 2016, hal ini diawali dari hasil musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, sehingga diarahkan menjadi skala prioritas.

Dalam hal ini ditetapkan 5 akses pokok program kegiatan yang akan ditempuh pada tahun anggaran 2016 yaitu :

- Meningkatkan produktifitas dengan menggunakan teknologi tepat guna.
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, pengusaha kecil menengah yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya.
- Memberikan perlindungan konsumen
- Memberdayakan koperasi usaha kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional
- Meningkatkan akses permodalan koperasi dan UKM kepada sumber-sumber permodalan

2.2.6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Organisasi.

Sarana dan Prasarana pendukung didalam melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dianggap memadai, namun kalau dimungkinkan adanya penambahan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk dijadikan operasional lapangan mengingat saat ini baru ada kendaraan untuk operasional 3 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan dinas roda dua, khusus menyangkut sarana latop 5 buah, sedangkan mesin Ketik 2 buah

2.2.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pada Urusan Perdagangan Sosialisasi untuk kegiatan pos ukur ulang belum maksimal sehingga masyarakat masih enggan untuk melaksanakan ukur ulang, dan pengawasan UTTP kurang maksimal karena terlemdala oleh kurangnya waktu dan koordinasi
2. Pada Urusan Koperasi dan UKM Rendahnya SDM koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama sebagai pekerjaan sambilan sehingga koperasi tidak dapat berkembang secara maksimal
3. Pada Urusan Industri pembinaan yang dilakukan masih sedikit dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana pembinaan, sehingga pembinaan IKM hanya diperuntukan kepada sentra yang potensial sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat binaan, hal ini berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sentra yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kuranya pembinaan.

Solusi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan lintas sektoral akan ditingkatkan
2. Memberiakan pelatihan dan motivasi uasa dalam menjalankan perkoperasian
3. Mengelola sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan diaman peranan dinas perindagkop dan UKM adalah bagaimana hasil sumber daya lam yang ada dapat diolah dan ditingkatkan diverifikasi produknya.

2.2.8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.

Inovasi-inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik berupa TDI, SIUP, TDP, IUI dll.

2. Fasilitasi kepada sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM tentang adanya pameran-pameran dan lelang komoditi berjangka hal ini sangat penting untuk meningkatkan omset penjualan bagi pelaku usaha di Kabupaten Pasaman.
3. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat melakukan pelatihan manajemen, kemasan, kewirausahaan, pengolahan pangan, bimbingan teknis, diklat bidang perdagangan, perkoperasian kepada pelaku usaha sehingga dapat berkembang secara optimal.

BAB III
TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

3.1.1 Tidak Ada

1 Dasar Hukum (DIPA atau dokumen yang disamakan dan berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan)

Tidak Ada

2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tidak Ada

3 Program dan Kegiatan tugas pembantuan yang diterima

Tidak Ada

4 Menjelaskan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tugas pembantuan yang diterima selama tahun 2015.

Tidak Ada

5 Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Tidak Ada

6 Bidang dan Sub bidang Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Tidak Ada

7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagaimana point 5 diatas.

Tidak Ada

8 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan kurang memadai Tidak Ada

9 Permasalahan

Tidak Ada

Solusi

Tidak Ada

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tidak Ada

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

4.2.1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Pengeran kontraktor

2. Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)
Nomor : 510/1725/SP/Perindagkop.UKM/IX/2016 tanggal 23 September 2016
3. Bidang yang dikerjasamakan
DAK Bidang Perdagangan
4. Nama Kegiatan kerjasama
Pekerjaan Pengembangan /Pembangunan Pasar Benteng
5. Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Bidang Perdagangan
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina IV/a	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	2 Orang
Eselon IV	SMA	Penata Tk I /III/d	1 Orang
Staf	S.2	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	1 Orang
Staf	S1	Penata III/c	1 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda/IIa	1 Orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggran 2016 Rp. 391.921.000 ,-
8. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama 90 Hari kelender kerja
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahterimakan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan (PHO/FHO).

- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

4.2.2 Mitra Yang Diajak Kerjasama

Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Gemilang Jaya

2. Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)
Nomor : 510/1574/SP/Perindagkop.UKM/IX/2016 tanggal 23 September 2016
3. Bidang yang dikerjasamakan
DAK Bidang Perdagangan
4. Nama Kegiatan kerjasama
Pembangunan /Pembangunan Pasar Panti
5. Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Bidang Perdagangan
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina IV/a	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	2 Orang
Eselon IV	SMA	Penata Tk I /III/d	1 Orang
Staf	S.2	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	1 Orang
Staf	S1	Penata III/c	1 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda/IIa	1 Orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2015 Rp.299.071.000-
8. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama 90 Hari kelender kerja
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Pasar Pembangunan Los Pasar Benteng
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan (PHO/FHO).

10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada

11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

4.2.3 Mitra Yang Diajak Kerjasama

1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Samudra Jaya Abadi

2 Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)
Nomor : 510/1632/SP/Perindagkop.UKM/XI/2016 tanggal 7 September 2016

3 Bidang yang dikerjasamakan
DAK Bidang Perdagangan

4 Nama Kegiatan kerjasama
Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kumpulan Kecamatan Tapus

5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Bidang Perdagangan

6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina IV/a	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	2 Orang
Eselon IV	SMA	Penata Tk I /III/d	1 Orang
Staf	S.2	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Tk I III/b	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	1 Orang
Staf	S1	Penata III/c	1 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda/IIa	1 Orang

7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 727.361.000,-

8 Jangka Waktu Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama 110 Hari kelender kerja

9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan (PHO/FHO).

- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- 4.2.4 Mitra Yang Diajak Kerjasama
- 1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Hayati
- 2 Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)
SPK Nomor : 510/1688/PBJ/Perindagkop.UKM/IX-2016 tanggal 30 September 2016
- 3 Bidang yang dikerjasamakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 4 Nama Kegiatan kerjasama
Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor sebanyak 6 unit
- 5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Sekretariat
- 6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.
- | | Kualifikasi Pendidikan | Pangkat/Gol | Jumlah |
|------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Eselon II | S2 | Pembina Utama Muda /IV/c | 1 Orang |
| Eselon III | S.1 | Pembina Tk I IV/b | 1 Orang |
| Eselon IV | S.1 | Penata Tk I /III/d | 3 Orang |
| Staf | D.3 | Pengatur /II/d | 1 Orang |
| Staf | S1 | Penata Muda III/a | 2 Orang |
| Staf | SMA | Pengatur Muda II/a | 2 Orang |
| Staf | SMP | Juru I/c | 1 Orang |
- 7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 83.362.000,-
- 8 Jangka Waktu Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama 30 Hari kalender kerja
- 9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengadaan Motor Operasional kantor sebanyak 6 unit.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2015 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan (PHO/FHO).
- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

4.2.5 Mitra Yang Diajak Kerjasama

- 1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
Toko Gembira Bukittinggi
- 2 Dasar Hukum DPA 2016
- 3 Bidang yang dikerjasamakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 4 Nama Kegiatan kerjasama
Pengadaan 1 unit alat pendingin
- 5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Sekretariat
- 6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina Tk I IV/b	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	3 Orang
Staf	D.3	Pengatur /II/d	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	2 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda II/a	2 Orang
Staf	SMP	Juru I/c	1 Orang

- 7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 4000.000,-
- 8 Jangka Waktu Kerjasama
Pembelian Langsung
- 9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengadaan 1 unit alat pendingin.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan
- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

4.2.6 Mitra Yang Diajak Kerjasama

- 1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
Wezy Mandra/Power Computer
- 2 Dasar Hukum (Berita Acara Pembayaran)
Nomor : 1591/BAP/Perindagkop.UKM/2016 tanggal 25 September 2016
- 3 Bidang yang dikerjasamakan
Pengadaan peralatan dan mesin
- 4 Nama Kegiatan kerjasama
Pengadaan 2 Unit Laptop dan 1 Unit Printer
- 5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Industri
- 6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.2	Pembina Tk I IV/b	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	2 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	2 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda II/a	1 Orang

- 7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 16.400.00,-
 - 8 Jangka Waktu Kerjasama
30 Hari
 - 9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengadaan Pengadaan 2 Unit Laptop dan 1 Unit Printer
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan
 - 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
 - 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
- 1 Tidak Ada

4.2.7 Mitra Yang Diajak Kerjasama

- 1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Pasaman Gorden
- 2 Dasar Hukum DPA 2016
- 3 Bidang yang dikerjasamakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 4 Nama Kegiatan kerjasama
Pengadaan 1 paket gorden
- 5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Sekretariat
- 6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina Tk I IV/b	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	3 Orang
Staf	D.3	Pengatur /II/d	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	2 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda II/a	2 Orang
Staf	SMP	Juru I/c	1 Orang

- 7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 32.480.000,-
- 8 Jangka Waktu Kerjasama
Pembelian Langsung
- 9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengadaan 1 Paket Gorden.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan
- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

4.2.8 Mitra Yang Diajak Kerjasama

- 1 Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/kontraktor baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta diantaranya adalah sebagai berikut :
CV. Suka Fajar
- 2 Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)
SPK Nomor : 510/1690/PBJ/Perindagkop.UKM/III-2016 tanggal 4 Maret 2016
- 3 Bidang yang dikerjasamakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 4 Nama Kegiatan kerjasama
Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor sebanyak 1 unit Roda 4
- 5 Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Sekretariat
- 6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD.

	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah
Eselon II	S2	Pembina Utama Muda /IV/c	1 Orang
Eselon III	S.1	Pembina Tk I IV/b	1 Orang
Eselon IV	S.1	Penata Tk I /III/d	3 Orang
Staf	D.3	Pengatur /II/d	1 Orang
Staf	S1	Penata Muda III/a	2 Orang
Staf	SMA	Pengatur Muda II/a	2 Orang
Staf	SMP	Juru I/c	1 Orang

- 7 Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama
APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 159.984.500,-
- 8 Jangka Waktu Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama 30 Hari kalender kerja
- 9 Hasil (Output) Dari Kerjasama, merupakan laporan realisasi terhadap hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengadaan Mobil Operasional kantor sebanyak 1 unit.
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100 % sampai akhir tahun 2016 dan segala pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak penyedia kegiatan (PHO/FHO).
- 10 Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
Tidak Ada
- 11 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2016, merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah ,provinsi dan kabupaten kota sehingga terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pasaman “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Maju,Sejahtera, Agamis dan Berbudaya” telah ditetapkan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.

Keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan tersebut sangat tergantung pada komitmen serta kesungguh-sungguhan para penyelenggaranya dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Desember 2016

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN

ANWIR, S.Sos

Nip. 19640120 198708 1 001

